



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Peran Indigenous Peoples dan Soft Power dalam Aktivitas
Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada***

Skripsi

Oleh

Hellen

2017330015

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Peran Indigenous Peoples dan Soft Power dalam Aktivitas
Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada***

Skripsi

Oleh

Hellen

2017330015

Pembimbing

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

Bandung

2021


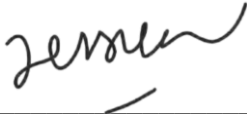
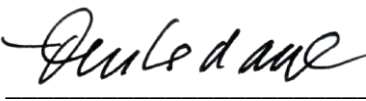
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hellen
Nomor Pokok : 2017330015
Judul : Peran *Indigenous Peoples* dan *Soft Power* dalam Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 21 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Anggia Valerisha, S.IP., M.Si. : 
Sekretaris
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol. : 
Anggota
Sapta Dwikardana, Ph.D. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hellen

NPM : 2017330015

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran *Indigenous Peoples* dan *Soft Power* dalam Aktivitas
Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juli 2021



Hellen

Abstrak

Nama : Hellen
NPM : 2017330015
Judul : Peran *Indigenous Peoples* dan *Soft Power* dalam Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada

Penelitian ini didasari oleh latar belakang usaha negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingan nasional yang dimiliki melalui kapabilitas *hard power*. Tetapi negara-negara kecil seperti Selandia Baru memiliki hambatan dalam memenuhi kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya kapabilitas *hard power*, sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut negara ini memanfaatkan kapabilitas *soft power* yang dimiliki sebagai solusi untuk menghadapi hambatan yang dialaminya. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana dampak yang dihasilkan oleh aktivitas diplomasi publik Selandia Baru terhadap hubungan diplomatiknya dengan Kanada. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa konsep seperti konsep kebijakan luar negeri, diplomasi, *small states*, *hard power*, *soft power*, diplomasi publik, penetrasi dan dampak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Sehingga berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas diplomasi publik Selandia Baru terhadap Kanada memiliki dampak positif terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Melalui hubungan diplomatik kuat yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang semakin mendalam antara Kanada dengan Selandia Baru. Aktivitas diplomasi publik ini membantu Selandia Baru menjalin kerja sama perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) pertama dengan Kanada. Tidak hanya itu, dampak utama tersebut juga diikuti oleh sejumlah dampak lainnya kemudian mampu membantu Selandia Baru dalam melindungi serta mencapai kepentingan nasionalnya.

Kata kunci: dampak, diplomasi publik, *small state*, Selandia Baru, Kanada

Abstract

Name : Hellen
NPM : 2017330015
Title : *The Role of Indigenous Peoples and Soft Power in New Zealand's Public Diplomacy Activities towards Canada*

The background of this research based on the efforts of countries in the world to achieve their national interests through hard power capabilities. However, small countries like New Zealand are facing obstacles in protecting and achieving its national interests. This is caused by the lack of hard power capabilities, hence New Zealand utilize its soft power capabilities to overcome the disadvantage. Therefore, this research tries to answer how the impact of New Zealand's public diplomacy activities on its diplomatic relations with Canada. This research use several concepts such as the concept of foreign policy, diplomacy, small states, hard power, soft power, public diplomacy, penetration and impact using descriptive qualitative research methods based on case study. Based on the research that has been conducted, it can be concluded that New Zealand's public diplomacy activities towards Canada have a positive impact on diplomatic relations between the two countries. Through strong diplomatic relations influenced by the deepening level of trust between Canada and New Zealand. This public diplomacy activities helped New Zealand establish its first Free Trade Agreement with Canada. This strong diplomatic relations also have a number of other impacts which were then able to assist New Zealand in protecting and achieving its national interests.

Keywords: impact, public diplomacy, small state, New Zealand, Canada

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada melalui Pemanfaatan *Soft Power*” dengan baik dan mampu memenuhi syarat ujian akhir Jenjang Sarja Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dikarenakan masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dan dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Bandung, 11 Juli 2021

Hellen

Ucapan Terima Kasih

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam proses pembelajaran maupun penulisan penelitian ini di Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan berkah-Nya yang telah membantu saya untuk tetap mampu mengerjakan dan menyelesaikan penelitian ini hingga rampung.
2. Keluarga Dapur KhaBita (tentunya papa, mama, Intan, Iha) yang telah menjadi *support system* saya di rumah, tanpa mereka mungkin tidak akan drama harian yang lucu dan menghibur.
3. Mba Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol. yang dengan sabar dan tabah membimbing serta mendengar semua ide maupun kekhawatiran saya selama melakukan penelitian ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua saran dan pesannya, Mba!
4. Seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu yang telah disampaikan dan dibagikan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Terkhusus *sausage gang* (Juju, Jojo, Lily), *the kittens* (Woori, Gehenna, Kucil, Lulu, Lucifer), dan *the elders* (Bobby dan Merry) yang telah menjadi sumber penyemangat saya 24/7. *Thank you so much guys!*

6. Para *support system numero unoku*: penghuni grup OSOT (Ora Semangat Ora Tamat) 1.0 dan OSOT ORI, Adelaide Talia, Christina Shavira Natalia, Indita Putri Sindaran, Muhammad Aulia Fathurrahman, Joseph, Tama Marina yang telah mendengarkan segala keluh-kesah dan cerita-cerita tidak penting saya.
7. (Alm.) Natalia Pasau Tikurampan yang telah menjadi *support system* saya hingga akhir hayatnya. *Thank you so much for be there whenever I need you.*
8. Kak Valentina Sari—*my college's mom*—untuk semua hal! *From listened to all of my rambles until gave me a precious advices.* Ko Alexander Evan Putra—*gramps—who always reminds me to take it easy (almost for everything) and reminds me of my goals.* *Thank you so so much.*
9. Kei, Yohan dan kawanannya yang telah menyemangati saya 24/7 tanpa lelah. *ども ありがとう~*
10. Teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan yang telah menghabiskan banyak waktu bersama penulis, khususnya Aikido Dojo UNPAR, grup halu (Zeezilia Yusuf, Indita Putri Sindaran, Netanya Nurul, Thea Manulang, dan Christina Shavira Natalia) dan tentunya delegasi Singapura (Adelaide Talia, Chikita Wulandari, Christina Shavira Natalia, Agnes, Felicia Rosaline, Abigail Irene, Dhant Bargen Tola, Yeremia)! *Thank you for everything!*
11. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan, terima kasih telah terlibat secara langsung maupun tidak selama proses penelitian ini dilakukan.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Singkatan.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1. Kajian Literatur.....	10
1.4.2. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.5.1. Metode Penelitian.....	25

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.6. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II: Selandia Baru sebagai <i>Small State</i> dengan <i>Soft Power</i> dan Diplomasi Publik.....	29
2.1 Selandia Baru sebagai Negara Kecil.....	30
2.2 Selandia Baru dan <i>Soft Power</i>	46
2.3 Selandia Baru, para negara mitra dan Kanada.....	61
BAB III: Dampak yang dihasilkan oleh Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru melalui Penetrasi Seni dan Kebudayaan serta <i>Indigenous People</i>.....	72
3.1 Penetrasi Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada.....	73
3.2 Dampak yang dihasilkan oleh Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada.....	88
BAB IV: KESIMPULAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	106
Lampiran	

Daftar Tabel

2.1 Penilaian Objektif Status Selandia Baru sebagai Negara Kecil.....	32
2.2 Perbandingan <i>Hard Power</i> Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada...	70

Daftar Gambar

Gambar 1.1 *Inputs, Outputs, Outcomes*.....24

Daftar Lampiran

Lampiran 2.1 Pernyataan mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark melalui <i>feed Twitter</i>	117
Lampiran 3.1 Manfaat yang diperoleh Selandia Baru melalui FTA dengan Kanada yang diwadahi oleh CPTPP.....	117

Daftar Singkatan

ANZCERTA / CER	<i>Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement</i>
ANZLF	<i>Australia New Zealand Leadership Forum</i>
ANZAC	<i>Australian and New Zealand Army Corps</i>
ANZUS	<i>Australia New Zealand United States</i>
APEC	<i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CAEP	<i>Cultural and Art Form Exchange Programme</i>
CDIP	<i>Cultural Diplomacy International Programme</i>
CDR	<i>Close Defence Relations</i>
CNZ	<i>Creative New Zealand</i>
CPTPP	<i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FOSS	<i>The Forum of Small States</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>

HAM	Hak Asasi Manusia
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IPS	<i>Indigenous Performance Symposium</i>
ISIL	<i>Islamic State in Iraq and the Levant</i>
<i>KIWI Act</i>	<i>Knowledgeable Innovators and Worthy Investors Act</i>
KLN	Kepentingan Luar Negeri
MCH	<i>Ministry for Culture and Heritage</i>
MFAT	<i>Ministry of Foreign Affairs and Trade</i>
NGC	<i>National Gallery of Canada</i>
NZUS Council	<i>New Zealand United States Council</i>
LGB	<i>Lottery Grants Board</i>
ODA	<i>Official Development Assistance</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OI	Organisasi Internasional
UN	<i>United Nations</i>

UNDRIP	<i>UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
VOA	<i>Voice of America</i>
WAA	<i>Western Artists Alliance</i>
WAM!	<i>World Indigenous Art Market</i>
WB	<i>World Bank</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat merupakan salah satu dari banyaknya kepentingan negara yang harus dilindungi dan dipenuhi, yang mana hal ini dikenal sebagai kepentingan nasional. Berkaitan dengan kepentingan nasional, pada dasarnya kepentingan tersebut didorong dan disebabkan oleh situasi maupun kondisi yang dialami oleh sebuah negara, yang menjadikan negara tersebut harus menerapkan sejumlah kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan tersebut.¹ Tindakan itu tentu disebabkan juga oleh keterbatasan maupun ketidakmampuan sebuah negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya seorang diri. Di sisi lain juga keterbatasan tersebut memberikan pengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat maupun negara, salah satunya yaitu saat harus berhadapan dengan ancaman yang timbul baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga dalam konteks ini, kepentingan tersebut diterjemahkan menjadi kepentingan nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara untuk bertahan hidup di lingkup dunia internasional. Maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam melindungi serta memenuhi kepentingan nasional yang dimiliki.

¹ Bela B. Bidova; Valeria P. Lebedinskaya; Olympiada N. Charitonova, "The genesis of the concept of National Interest: Theoretical and Legal Analysis", 6, no. 36: 1-35, diakses 21 Oktober 2020.

Kemudian, kepentingan nasional tersebut kemudian diterjemahkan melalui kebijakan luar negeri yang mana kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk membantu negara dalam menentukan serta mengidentifikasi tindakan, keputusan dan strategi apa yang harus mereka lakukan saat berinteraksi dengan negara atau aktor lain.² Melalui pembuatan kebijakan luar negeri tersebut, pemerintah kemudian dapat melakukan berbagai macam cara untuk melindungi dan bahkan mencapai kepentingan nasional yang dimiliki. Karena dalam konteks ini, kebijakan luar negeri pun dalam praktiknya terdiri dari berbagai macam strategi serta gagasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan nasional, semisal melalui diplomasi—baik yang dilakukan secara tradisional maupun tidak—atau melalui penggunaan *hard power*—semisal menggunakan paksaan, ancaman, sanksi dan lain-lain.³ Dalam melakukan upaya tersebut, negara juga dapat melibatkan dirinya dalam berbagai macam forum maupun kegiatan yang ada baik di level kawasan maupun internasional. Melalui keterlibatan tersebut, negara kemudian memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan aktor lain, membentuk koalisi, perjanjian, maupun organisasi yang dapat membantu negara tersebut untuk melindungi bahkan mencapai kepentingan nasional yang dimiliki.

Baik negara besar maupun negara kecil (*small state*), tentu negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dengan level urgensi yang bervariasi. Salah satu contohnya adalah Selandia Baru yang mana dalam konteks ini memiliki kepentingan nasional yang sangat penting untuk

² Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations”, *J Pol Sci Pub Aff* 6, no.4 (2018): 1-9, diakses 23 November 2020.

³ Ibid.

dilindungi dan dicapai. Dalam upaya untuk melindungi serta mencapai kepentingan tersebut, Selandia Baru juga melibatkan dirinya di berbagai macam organisasi seperti UN (*United Nation*), WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), dan lain-lain. Begitu pula dengan kontribusi yang ia lakukan semisal dalam upaya penanganan perubahan iklim, operasi penjaga perdamaian dan lain-lain.⁴

1.2 Identifikasi Masalah

Selandia Baru merupakan negara yang tergolong ke dalam negara kecil yang masih cukup bergantung pada kegiatan ekspor dan kerja sama internasional.⁵ Dimana jika melihat keterlibatan Selandia Baru dalam berbagai macam forum serta organisasi baik secara kawasan maupun internasional, dapat dikatakan bahwa keterlibatan yang ia lakukan didorong oleh urgensi untuk melindungi kepentingan nasional yang dimiliki. Salah satunya adalah untuk memastikan dan menjaga negara maupun masyarakat Selandia Baru aman, makmur dan sejahtera.⁶ Dimana kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara dalam konteks ini juga dapat

⁴ Rod Alley, "Multilateral organisations", Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. Last modified June 20, 2012. Diakses 4 Maret 2021 <https://teara.govt.nz/en/multilateral-organisations/print>

⁵ Jeremy Tod, "The Great Kiwi Balancing Act", *The Diplomat*, 21 October, 2014, diakses 7 Maret 2021. <https://thediplomat.com/2014/10/the-great-kiwi-balancing-act/>

⁶ New Zealand. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, *New Zealand's place in a changing world* (Wellington: New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade, 2018). Diakses 16 Maret 2018 <https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/new-zealands-place-in-a-changing-world/>

dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan yang dimiliki di dalam ranah internasional. Tidak hanya itu, terdapat pernyataan bahwa ‘semakin banyak kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara, maka semakin aman kehidupan negara tersebut,⁷ dan pernyataan ini dapat mempengaruhi negara dalam menentukan kepentingan nasional utama yang diprioritaskan.

Tetapi kemudian, jika kedua alasan tersebut memang mendorong negara untuk membentuk dan mengetahui kepentingan nasional yang dimiliki, maka hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkait kepentingan nasional yang dimiliki oleh Selandia Baru. Begitu juga dengan keterlibatannya di dalam berbagai macam kegiatan dalam level kawasan maupun internasional. Dimana jika hal tersebut terkait posisi Selandia Baru, maka sebagai negara kecil wajar bagi Selandia Baru untuk merasa terancam di dunia internasional—yang secara umum didominasi dengan negara-negara besar—dan berusaha untuk memastikan keamanan negara dan melindungi kepentingan nasionalnya. Namun jika terkait dengan kekuatan secara tradisional seperti kapabilitas militer—yang dikenal sebagai *hard power*—walaupun Selandia Baru merupakan negara kecil, negara ini juga memiliki kapabilitas *hard power* sebagaimana negara-negara lainnya.

Tetapi jika kembali melihat kepentingan nasional yang dimiliki, maka terdapat ketidaksesuaian terhadap situasi yang dialami oleh Selandia Baru dengan pernyataan kedua. Dimana asumsi ini kemudian dibuktikan melalui pernyataan bahwa Selandia Baru yang dikenal sebagai negara kecil ini ternyata memang

⁷ Morton A. Kaplan, “Values, National Interests, and Other Interests” *International Journal of World Peace* 31 no. 2 (2014): 57-72.

memiliki kekurangan dalam aspek *hard power* dan hal ini tentu menjadi pertanyaan terkait bagaimana negara ini melindungi dan mencapai kepentingan nasional yang dimiliki.⁸

Namun keterbatasan tersebut tidak menjadikan Selandia Baru berhenti untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang ia miliki. Selandia Baru mengetahui bahwa negaranya memang memiliki kelemahan dalam aspek *hard power*, tetapi memiliki kelebihan dalam aspek *soft power*. Yang mana kemudian aspek tersebut digunakan oleh Selandia Baru dengan semaksimal mungkin melalui berbagai macam cara dan bentuk penggunaan. Salah satu bentuk dari pemanfaatan *soft power* tersebut adalah diplomasi publik yang memanfaatkan seni dan kebudayaan Selandia Baru.

Dalam konteks ini, Selandia Baru meluncurkan beberapa aktivitas diplomasi publik yang ditujukan ke negara lain, semisal *Cultural Exchange Programme*, CDIP (*Cultural Diplomacy and International Programme*) dan CAEP (*Cultural and Artform Exchange Programme*). Aktivitas diplomasi publik tersebut ditujukan oleh Selandia Baru kepada negara yang ia anggap penting dan memiliki pandangan—ketertarikan serupa dengan apa yang digunakan oleh Selandia Baru dalam diplomasi publiknya. Karena dalam konteks diplomasi yang dilakukan oleh

⁸ Grant Wyeth, "New Zealand's Pacific Reset: Building Relations Amid Increased Regional Competition" *The Diplomat*, 10 June 2019, diakses 20 Maret 2021. <https://thediplomat.com/2019/06/new-zealands-pacific-reset-building-relations-amid-increased-regional-competition/>

negara kecil, sering kali negara tersebut akan memilih negara yang dinilai sangat penting untuk dijadikan target dari diplomasi yang ia lakukan.⁹

Tetapi berangkat dari kepentingan nasional yang dimiliki oleh Selandia Baru, kekurangan dalam aspek *hard power*, ketidaksesuaian muncul dalam usaha Selandia Baru yang ingin melindungi serta memenuhi kepentingan nasionalnya yang berhubungan dengan *hard power* melalui penggunaan *soft power* yang terlebih lagi dalam praktiknya memanfaatkan sumber seni dan kebudayaan. Di sisi lain pun, terdapat pernyataan bahwa penggunaan *soft power* yang bersumber dari seni dan kebudayaan ini pada dasarnya merupakan salah satu kunci yang kuat dalam usaha Selandia Baru untuk memenuhi kepentingannya dan memiliki dampak yang bisa disebut dengan efek *spillover*—yang mana dampak yang muncul tidak hanya terbatas pada sektor seni dan budaya saja. Maka dari itu, penelitian ini berusaha membahas dan menganalisis bagaimana sektor seni dan kebudayaan—yang notabeneanya bertolak belakang dengan *hard power*—dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kepentingan Selandia Baru yang umumnya memiliki latar belakang berkaitan dengan *hard power* melalui dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas diplomasi publik.

⁹ Ashvin Gonesh; Jan Melissen, *Public Diplomacy: Improving Practice* (The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2005), hal. 10.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi penelitian ini dengan tujuan untuk memperjelas konteks penelitian. Pembatasan penelitian ini dimulai dengan membatasi aktor-aktor yang terlibat yaitu Selandia Baru dan Kanada sebagai aktor negara, *indigenous peoples* Selandia Baru dan Kanada sebagai aktor non-negara. Kedua penelitian ini berfokus pada aktivitas pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh Selandia Baru terhadap Kanada melalui dua institusi seni yaitu *Creative New Zealand (CNZ)* dan *Banff Centre* dari Kanada, begitu pula dengan kegiatan internasional seperti festival dan pertukaran kebudayaan lainnya yang melibatkan kedua negara ini pada tahun 2010 hingga 2016. Lalu ketiga, penelitian ini berfokus pada bagaimana cara Selandia Baru melindungi serta mencapai kepentingan nasional yang dimiliki melalui aktivitas diplomasi publik terhadap Kanada melalui penetrasi seni dan kebudayaan serta *indigenous peoples*. Begitu pula dengan pembahasan terkait dampak yang dihasilkan oleh aktivitas diplomasi publik ini pada tahun 2016.

1.2.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan yang telah dideskripsikan pada bagian latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Penulis kemudian menemukan kesenjangan pada fenomena yang terjadi dan hal tersebut memicu pertanyaan penelitian terkait praktik yang dilakukan oleh Selandia Baru yaitu, berdasarkan

aktivitas diplomasi publik yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Kanada, **Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh aktivitas diplomasi publik Selandia Baru terhadap hubungan diplomatiknya dengan Kanada?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di bagian sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas diplomasi publik yang dilakukan Selandia Baru terhadap Kanada berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Begitu juga dengan menjelaskan dampak-dampak yang dihasilkan dan bagaimana aktivitas diplomasi publik ini mampu membantu Selandia Baru dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Praktik diplomasi ini dilakukan melalui berbagai macam aktivitas pertukaran seni dan kebudayaan internasional serta festival internasional. Pelaksanaanya Selandia Baru memanfaatkan sumber daya *soft power* seni dan kebudayaan serta *common ground* yang dimilikinya dengan Kanada, yaitu *indigenous peoples*. Yang mana dalam aktivitas diplomasi publik yang dilakukan, *indigenous peoples* memiliki peran penting sebagai ‘motor’ dari praktik diplomasi publik yang dilaksanakan oleh Selandia Baru terhadap Kanada. Karena melalui peran *indigenous peoples* inilah Selandia Baru berusaha untuk membangun

kepercayaan yang kuat dan mendalam terhadap Kanada, baik secara *people-to-people* maupun *government-to-government*.

Kepercayaan yang tumbuh itu lalu memiliki potensi untuk memperdalam dan memperkuat hubungan yang dimiliki oleh Selandia Baru dan Kanada. Beranjak dari proses yang terjadi pada aktivitas diplomasi publik Selandia Baru ini, penulis menilai bahwa diplomasi publik tersebut menjadikan hubungan diplomatik Selandia Baru dengan Kanada semakin menguat dan mendalam. Dimana hubungan diplomatik tersebut kemudian menghasilkan sejumlah dampak positif bagi Selandia Baru maupun Kanada dan dampak tersebut dapat dilihat pada berbagai macam bidang. Salah satunya terkait perjanjian perdagangan bebas dan dampak yang dihasilkan tidak terbatas pada perjanjian perdagangan bebas. Melalui dampak yang dihasilkan oleh aktivitas diplomasi publik ini, Selandia Baru memiliki kesempatan untuk melindungi serta memenuhi kepentingan nasional yang dimilikinya

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang baik pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional secara umum maupun secara spesifik yaitu pada studi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya *soft power* suatu negara melalui diplomasi publik. Dimana isu yang diangkat oleh penulis merupakan isu Hubungan Internasional yang memiliki basis atau latar belakang yang mengharuskan para aktor negara untuk melakukan kerja sama dengan aktor

lain. Kerja sama yang dilakukan dalam konteks ini dapat dipraktikkan melalui berbagai macam bentuk sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh para aktor dengan tujuan dan harapan mereka dapat melindungi dan memenuhi kepentingan nasional yang mereka miliki melalui kerja sama tersebut.

1.4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa artikel yang memiliki topik bahasan terkait diplomasi publik serta dampak yang muncul dari praktik tersebut. Artikel-artikel ini kemudian akan membantu penulis untuk memastikan informasi yang diketahui oleh penulis merupakan informasi yang valid dan dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait topik yang diangkat dalam penulisan ini.

“New Zealand’s public diplomacy in the Pacific: a reset, or more of the same?” paper yang ditulis oleh Simon Mark menjelaskan secara langsung bahwa kini Selandia Baru melihat diplomasi publik sebagai praktik yang sangat penting. Dimana praktik ini dinilai oleh MFAT (*Ministry of Foreign Affairs and Trade*) sebagai pendekatan baru yang dapat membantu Selandia Baru dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan Pasifik, terlebih lagi menjangkau individu atau kelompok yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. *Pacific Reset* merupakan sebuah inisiatif kebijakan luar negeri Selandia Baru yang

muncul dari urgensi yang terdapat dalam kawasan Pasifik. Perubahan iklim, perebutan kekuasaan, kompetisi yang dilakukan oleh negara di luar kawasan untuk menunjukkan pengaruhnya, serta citra kawasan Pasifik yang kini dilihat sebagai kawasan strategis merupakan beberapa dari banyaknya masalah yang muncul di kawasan tersebut.

Maka dari itu, MFAT kemudian menggunakan *soft diplomacy*, diplomasi publik, serta *people-to-people measures* sebagai cara untuk melaksanakan program *Pacific Reset*, dimana dalam praktiknya kemiripan atau kesamaan umum yang dimiliki oleh Selandia Baru dengan negara-negara Pasifik seperti kesamaan budaya, membantu Selandia Baru dalam pelaksanaan program tersebut. Dikarenakan hal tersebut, diplomasi publik yang dijalankan oleh Selandia Baru dalam program ini memanfaatkan aktivitas diplomasi budaya seperti olahraga, program pertukaran, konferensi, lokakarya, seni visual, literatur, film dan lain-lain. Yang mana aktivitas tersebut juga didukung oleh pemanfaatan sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *Twitter* yang membantu Selandia Baru dalam menyiarkan aktivitas diplomasi publik yang dilakukan. Selain itu, melalui praktik program tersebut Selandia Baru mengharapkan dampak positif yang dapat memperdalam serta mengembangkan hubungan kerja sama Selandia Baru dengan negara-negara di kawasan tersebut—begitu pula dengan membentuk kerja sama yang lebih baik lagi, meningkatkan pengaruh dan kepentingan Selandia Baru, dan merubah pandangan negara-negara di kawasan Pasifik terhadap Selandia Baru yang semula dilihat sebagai donor menjadi mitra kerja sama. Maka dari itu, MFAT menekankan bahwa diplomasi publik kini merupakan praktik yang dinilai sangat penting karena dampak yang

dimiliki dapat memberikan pengaruh pada tujuan kebijakan yang sifatnya jangka pendek, namun memiliki pengaruh jangka panjang dalam konteks pembangunan.¹⁰

Selanjutnya artikel jurnal berjudul '*The Influence of Public Diplomacy on the States Visibility in the International Relations*' yang ditulis oleh Viktorija Trajkov dan Goran Trajkov membahas diplomasi publik yang didasari oleh pemahaman Amerika Serikat dan diplomasi publik yang dilakukan oleh negara-negara kecil. Dalam artikel ini, diplomasi publik diartikan sebagai alat untuk mempromosikan kepentingan serta keamanan nasional Amerika Serikat melalui penyebaran informasi, pemahaman, serta pengaruh yang ditujukan pada publik asing dengan tujuan untuk memperluas dialog antara warga dengan institusi domestik Amerika Serikat dengan rekan asing di luar negeri, sehingga tindakan tersebut dapat mempengaruhi tindakan dan sikap masyarakat dalam mendukung kebijakan dan kepentingan nasional Amerika Serikat. Melalui pertukaran individu, pertukaran gagasan, hal tersebut kemudian dapat membantu Amerika Serikat dalam membangun hubungan yang erat dengan publik asing. Tetapi dalam artikel ini pun, dijelaskan bahwa negara kecil seperti Polandia juga dapat melakukan diplomasi publik.

Studi kasus Polandia tersebut menggambarkan bahwa diplomasi publik yang dilakukan dapat memberikan dampak baik bagi Polandia, meskipun praktik yang dilakukan cukup memakan waktu. Dalam konteks ini, Polandia memanfaatkan

¹⁰ Simon Mark, "New Zealand's public diplomacy in the Pacific: a reset, or more of the same?" paper prepared for the 70th Annual ICA Conference (Auckland: Massey University College of Creative Arts Toi Rauwharangi, 2020) 1-13.

diplomasi publik ke negara-negara Uni Eropa pada tahun 2000 hingga 2004 dalam upaya untuk merubah citra yang dimiliki oleh Polandia agar *Accession Treaty* bisa diratifikasi. Dalam upayanya tersebut, Polandia melakukan kampanye yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi para pemimpin dan elit negara-negara Uni Eropa. Kemudian, berdasarkan penilaian negara-negara tersebut kampanye yang dilakukan oleh Polandia belum berhasil untuk merubah citra yang dimilikinya, dikarenakan Polandia belum mampu untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan jelas. Walaupun demikian, Polandia kemudian memperbaiki diplomasi publik yang ia lakukan dan hal tersebut kemudian berdampak pada proses ratifikasi *Accession Treaty*, dimana kemudian pada tahun 2004 Polandia resmi menjadi anggota Uni Eropa.¹¹

Bertolak belakang dengan dua artikel sebelumnya, artikel dengan judul '*Public Diplomacy: Tools of Power in Foreign Policy; (Case Study: Application of Public Diplomacy in Foreign Policy of United States of America)*' oleh Nargess Rostami justru membahas diplomasi publik yang gagal dan dampak negatif yang ditimbulkan. Artikel yang membahas diplomasi publik melalui sudut pandang Amerika Serikat ini mengatakan bahwa diplomasi publik yang dapat sejalan dengan praktik diplomasi tradisional dapat membantu atau memungkinkan Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingannya, melestarikannya, dan bahkan memberikan dasar etika dalam level kawasan dan internasional untuk melestarikan kepentingan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Argumen tersebut juga didukung

¹¹ Viktorija Trajkov; Goran Trajkov, "The Influence of Public Diplomacy of the States Visibility in the International Relations" *Journal of Liberty and International Affairs* 1, no. 2 (2015): 1-9.

dengan pernyataan bahwa opini publik dapat terbentuk dikarenakan oleh diplomasi publik yang berperan sebagai faktor pendukung di belakang layar dalam konteks praktik diplomasi tradisional yang dilakukan oleh para pemerintah.

Kejadian 9/11 juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Amerika Serikat dalam memanfaatkan diplomasi publik secara maksimal dengan berbagai cara dan bentuk seperti melalui pertukaran pelajar maupun siaran melalui VOA (*Voice of America*) di berbagai tempat, khususnya di kawasan Timur Tengah. Melalui usaha dan upaya diplomasi publik ini, Amerika Serikat mengharapkan dampak positif yang dapat merubah citra Amerika Serikat menjadi positif, menghilangkan atau melawan sentimen '*anti-US*', begitu pula membentuk rantai hubungan yang dapat memberikan landasan bagi Amerika Serikat untuk melakukan diplomasi tradisional dan kepentingan jangka panjangnya. Namun usaha yang dilakukan dinilai gagal oleh kawasan Timur Tengah karena apa yang disampaikan melalui diplomasi publik tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, pesan yang terdistorsi itu pun menunjukkan bahwa struktur praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak jelas, tidak koheren, dan tidak strategis. Maka dari itu kemudian diplomasi publik tersebut gagal dan memberikan dampak negatif pada citra serta opini publik asing terkait Amerika Serikat di Timur Tengah.¹²

Berdasarkan tiga artikel yang telah dijabarkan di atas yang secara garis besar menjelaskan diplomasi publik dan dampak yang dihasilkan bagi negara praktisi.

¹² Nargess Rostami, "Public Diplomacy; Tools of Power in Foreign Policy; (Case Study: Application of Public Diplomacy in Foreign Policy of United States of America)" *Journal of Business and Management Review* 3, no. 10 (2014): 189-198.

Terlepas dari definisi diplomasi publik, ketiga artikel-artikel tersebut memiliki metode atau cara praktik yang sedikit berbeda satu sama lain, semisal menggunakan budaya; media massa; dan bahkan menyelaraskan diplomasi publik dengan diplomasi tradisional. Tetapi, ketiga artikel tersebut menunjukkan perbedaan kontras terkait diplomasi publik yang dilakukan oleh negara besar maupun kecil. Dimana negara dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat bahkan mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingan yang ia miliki melalui diplomasi publik dan bahkan mendapatkan dampak negatif yang dinilai merugikan. Tentu kemudian kegagalan diplomasi publik Amerika Serikat tersebut berpotensi menimbulkan keresahan atau sikap pesimis dari negara-negara yang jauh lebih lemah dan kecil seperti Amerika Serikat. Tetapi Selandia Baru serta Polandia—walaupun memiliki kurun waktu yang berbeda—justru membuktikan hal sebaliknya. Baik sebagai negara kecil maupun negara baru, kedua negara tersebut terbilang berhasil mempraktikkan diplomasi publik hingga memberikan dampak positif bagi negara tersebut. Maka dari itu, penulis memposisikan diri untuk mendukung praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh negara kecil yang bahkan dapat menghasilkan dampak positif bagi negara tersebut.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Negara-negara di dunia pada umumnya memiliki berbagai macam kepentingan nasional yang harus dipenuhi, dalam konteks ini kumpulan kepentingan negara tersebut diterjemahkan menjadi kepentingan luar negeri (KLN).

Karena dalam usaha untuk memenuhi kepentingan tersebut, negara tidak dapat memenuhi kepentingan tersebut secara tunggal, negara dalam konteks ini didorong untuk bekerja sama dengan negara maupun aktor di luar wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka KLN sebagai konsep dapat diartikan sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan yang dimiliki dalam hubungannya dengan entitas eksternal, dimana keputusan untuk tidak melakukan apapun termasuk di dalamnya.

Kebijakan yang kemudian disebut sebagai KLN ini terbentuk dipengaruhi oleh aktor dan struktur baik yang berasal dari lingkungan domestik maupun luar negeri. Maka dari itu saat hendak mengimplementasikan KLN tersebut, negara tentu harus memperhatikan dan mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan apa yang dimiliki oleh negaranya, karena dalam konteks ini kemampuan tersebut merupakan kunci penentu terhadap apa yang bisa dilakukan oleh negara di level internasional. Terkait pernyataan hal itu, negara harus mengingat bahwa instrumen yang dapat digunakan oleh negara dalam mengimplementasikan KLN akan sangat bergantung pada kemampuan dasar yang dimiliki.¹³

Terkait instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh KLN, maka diplomasi merupakan salah satu instrumen tersebut. Keterkaitan kedua konsep ini ditunjukkan dengan cara yang dapat dilakukan oleh konsep diplomasi dalam upaya untuk mengimplementasikan KLN. Dimana cara tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi, menyebarkan informasi terkait KLN tersebut agar dapat dipahami, dan

¹³ Steve Smith; Amelia Hadfield; Time Dunne, eds, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* (United Kingdom: Oxford University Press, 2016), hal. 14-163.

jika praktik tersebut berhasil hal ini memungkinkan KLN tersebut diterima oleh negara lain. Dimana dalam praktiknya pun konsep diplomasi mengalami perubahan pada cara atau metode pelaksanaannya tetapi tetap dilandasi oleh esensi dari KLN. Interaksi yang terjadi saat melakukan diplomasi ini kemudian dapat berpotensi membangun hubungan antar kedua negara.

Maka dari itu kemudian diplomasi sebagai sebuah konsep dapat diartikan sebagai pelaksanaan hubungan antar negara dan entitas lain dalam dunia politik oleh agen resmi melalui cara yang damai.¹⁴ Tidak hanya itu, diplomasi pun dilihat sebagai ‘komunikasi’ yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas instrumen KLN lainnya, dan sebagai cara yang baik dalam menangani hubungan internasional. Dimana dalam konteks ini, praktik diplomasi dapat menggunakan kekayaan dan *power* untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara, praktik ini pun digunakan oleh negara untuk melatih pengetahuan mereka sebagai *power* dan begitu juga sebaliknya, *power* sebagai pengetahuan.¹⁵

Di sisi lain, praktik diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara besar atau negara dengan kekuatan besar, tetapi juga oleh negara kecil. Dimana secara umum konsep *small states* ini digambarkan sebagai negara kecil yang memiliki kekhawatiran dalam konteks keamanan yang disebabkan oleh ukuran negara

¹⁴ Sasson Sofer, “Old and New Diplomacy: A Debate Revisited” *Review of International Studies* 1, no.3 (1988): 195-211.

¹⁵ Costas M. Constantionou; Pauline Kerr; Paul Sharp, “Theoretical Perspective in Diplomacy”, di *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantionou; Paul Sharp (London: SAGE Publication Ltd., 2016), hal. 17-21.

mereka dan kerentanan yang mereka miliki dan hadapi. Dalam upaya untuk menentukan apakah sebuah negara tergolong ke dalam kategori negara kecil, FOSS (*The Forum of Small States*) dalam UN mendefinisikan negara kecil sebagai negara dengan populasi penduduk di bawah 10 juta jiwa, sedangkan WB (*World Bank*) dan *Commonwealth* menetapkan batasan pada angka 1,5 juta jiwa. Hal ini kemudian dijadikan indikator pertama untuk menentukan apakah negara tersebut merupakan negara kecil atau tidak, sehingga berikut merupakan indikator untuk negara kecil:

- *Population*: berada pada angka 1,5 juta jiwa hingga 5 juta jiwa.
- *Size*: diartikan sebagai luas teritori

Namun perlu diketahui bahwa dalam konteks ini ‘*smallness*’ yang dimiliki oleh suatu negara bersifat skala varian karena perbandingan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya belum tentu memiliki hasil yang sama.¹⁶ Walaupun demikian, *smallness* tersebut tidak menghalangi negara kecil untuk memenuhi kepentingan yang ia miliki dan dalam konteks ini negara kecil dikenal sebagai entitas yang menggunakan diplomasi sebagai ‘perisai’ untuk melindungi diri maupun untuk memenuhi kepentingan yang mereka miliki. Dimana diplomasi yang dilakukan kembali lagi pada kemampuan atau *power* yang dimiliki oleh negara tersebut dan secara umum negara kecil dikenal sebagai negara yang memiliki kekurangan di dalam aspek *hard power*.¹⁷

¹⁶ Benjamin Franklen Gussen, “On the Classification of Small States” hal. 227-250.

¹⁷ Kishan S Rana, “The Diplomacy of Small States” diakses 16 April 2021, <https://learn.diplomacy.edu/pool/fileInline.php?&id=20937>

Berkaitan dengan hal tersebut, kata *power* dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk bertindak dengan cara yang tidak mengharuskan pihak tersebut untuk bertindak sebaliknya. Sedangkan dalam konteks *hard power*, konsep ini diartikan sebagai kemampuan untuk memaksa pihak lain untuk melakukan tindakan yang bahkan tidak diinginkan oleh pihak tersebut. Dimana strategi dalam konsep ini berfokus pada intervensi militer, diplomasi koersif, dan sanksi ekonomi dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional, begitu pula dengan sikap mengancam, memaksa, maupun membujuk melalui kekuatan ekonomi. Hal tersebut didasari oleh sumber dari *hard power* itu sendiri—yaitu militer dan ekonomi—yang mampu membuat pihak lain mengubah posisi mereka.^{18 19}

Tetapi kembali lagi pada konsep *small states* yang menyatakan bahwa secara umum negara kecil memiliki kekurangan dan kelemahan dalam aspek *hard power*. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, negara kecil cenderung mencari sumber kekuatan lainnya. Secara umum negara kecil memiliki kapasitas *soft power* yang lebih mendukung dan dimanfaatkan dalam aktivitas diplomasi mereka. Sehingga *soft power* sebagai sebuah konsep memiliki arti sebagai kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi pihak lain (negara lain) untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh negara tersebut melalui daya tarik yang dimiliki dibanding melalui paksaan atau pembayaran. Dimana pengaruh yang disebarkan

¹⁸ Ernest J. Wilson III, "Hard Power, Soft Power, Smart Power" *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 616, (2008): 110-124.

¹⁹ Joseph S. Nye, Jr., *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (New York: Public Affairs, 2004).

melalui *soft power* ini dapat menjadikan negara lain untuk mengagumi negara praktisi dan bahkan ingin meniru negara tersebut.

Lalu pada dasarnya kekuatan ini merupakan kapasitas yang dimiliki sebuah negara untuk membentuk preferensi miliknya melalui sumber daya *intangible*. Dalam hal ini, aset tersebut merupakan hal yang dinilai dapat menghasilkan daya tarik yang dapat membantu negara dalam memenuhi kepentingan yang dimiliki. Dimana kemudian aset tersebut dijelaskan oleh Joseph Nye, bersumber dari tiga hal dan salah satunya adalah kebudayaan dimana hal tersebut dinilai dan dilihat menarik bagi pihak lain.²⁰ Maka berkaitan dengan sumber daya tersebut, sebuah negara seringkali memanfaatkan kebudayaan yang dimiliki melalui berbagai macam instrumen salah satunya ada diplomasi publik.²¹

Dimana diplomasi publik kemudian diartikan oleh Hans Tuch sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya untuk menunjukkan pemahaman atas gagasan maupun cita-cita sebuah bangsa, begitu pula pemahaman akan institusi dan kebudayaan, serta tujuan nasional dan kebijakan yang dimiliki.²² Selain itu, tujuan paling utama dari praktik diplomasi publik adalah meningkatkan atau memperkuat hubungan bilateral yang dimiliki oleh negara praktisi dengan targetnya. Tidak hanya itu, praktik tersebut pun dapat membantu

²⁰ Joseph Nye dalam artikel yang berjudul "*Public Diplomacy and Soft Power*" menjelaskan bahwa aset *soft power* berasal dari tiga sumber daya yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri.

²¹ Joseph S. Nye, Jr., "Public Diplomacy and Soft Power", *The Annals of the American Academy* 616, (2008): 94-109.

²² "The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice" di *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, ed. Jan Melissen (New York: Palgrave Macmillan, 2005) hal. 11-12.

negara tersebut untuk membangun identitas nasional dan bahkan memiliki dampak pada kinerja ekonomi negara tersebut.

Jan Melissen dan Ashvin Gonesh menyatakan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh negara kecil dapat berhasil melalui penyampaian pesan yang menarik dan tepat melalui aktivitas diplomasi publik yang dilakukan. Dimana pesan tersebut selalu dapat membantu publik asing untuk mengetahui prinsip, nilai serta kekuatan negara praktisi seraya menyadari kelemahan atau kekurangan negara tersebut. Maka dari itu kredibilitas merupakan kunci utama dalam praktik diplomasi publik yang memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan antar negara praktisi dengan targetnya.

Karena baik apa yang disampaikan oleh aktor tersebut (baik aktor negara maupun non-negara) harus sesuai dengan realita atau kondisi yang dialami dan tentu hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan KLN negara tersebut. Lalu dalam praktik diplomasi publik, praktik ini sangat bergantung pada kemampuan, sumber daya *power* (umumnya *soft power*), begitu pula dengan kebudayaan atau tujuan yang ingin capai. Maka dari itu diplomasi publik dikenal sebagai konsep '*no-one-size-fits-all*' atau dengan sifat *tailor-made*.²³

Maka kemudian, dalam menjalankan diplomasi publik yang memanfaatkan sumber daya budaya sebuah negara harus menggunakan pendekatan yang tepat. Alan K. Henrikson mengatakan bahwa sebuah negara dapat memperoleh dampak

²³ Ashvin Gonesh; Jan Melissen, *Public Diplomacy: Improving Practice*. The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2005. Hal. 4

dari diplomasi publik melalui lima pendekatan, salah satunya adalah melalui penetrasi (*penetration*).²⁴ Pendekatan ini diartikan sebagai usaha untuk menjangkau publik asing atau target diplomasi publik melalui berbagai macam cara dan salah satu yang paling umum dilakukan yaitu melalui program pertukaran budaya. Dimana penetrasi yang dilakukan ini dapat menumbuhkan rasa familier dan membentuk fondasi kepercayaan antar negara praktisi dengan target diplomasi publik.

Pendekatan melalui penetrasi dinilai serta dilihat sebagai bibit atau akar dalam membangun hubungan erat antara kedua belah pihak melalui rasa familier dan kepercayaan yang tumbuh tersebut. Sehingga melalui pendekatan ini, diplomasi publik dilihat sebagai jalan atau pintu kesempatan bagi pemerintah untuk mencapai kepentingan atau mendapatkan dampak yang diinginkan baik dalam konteks politik, ekonomi atau bahkan militer. Dan praktik diplomasi publik yang memanfaatkan sumber daya budaya melalui pendekatan penetrasi ini akan lebih mudah dilakukan dengan menargetkan aktor atau negara dengan sifat terbuka.²⁵

Kemudian untuk mengetahui dampak apa yang dihasilkan oleh praktik tersebut, Efe Sevin menggunakan beberapa aspek atau sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dampak tersebut, pertama sudut pandang sosialisasi.²⁶ Menurut Efe, proses sosialisasi di dalam praktik diplomasi publik

²⁴ Menurut Alan K. Henrikson terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan oleh negara dalam melaksanakan praktik diplomasi publik, yaitu melalui *consolidation*, *containment*, *penetration*, *enlargement* dan *transformation*.

²⁵ Alan K. Henrikson, *What Can Public Diplomacy Achieve?* The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2006. Hal. 24-28.

²⁶ Terdapat 6 pendekatan artikel ini yaitu *attraction*, *benefit of the doubt*, *socialization*, *direct influence*, *agenda setting* dan *framing*.

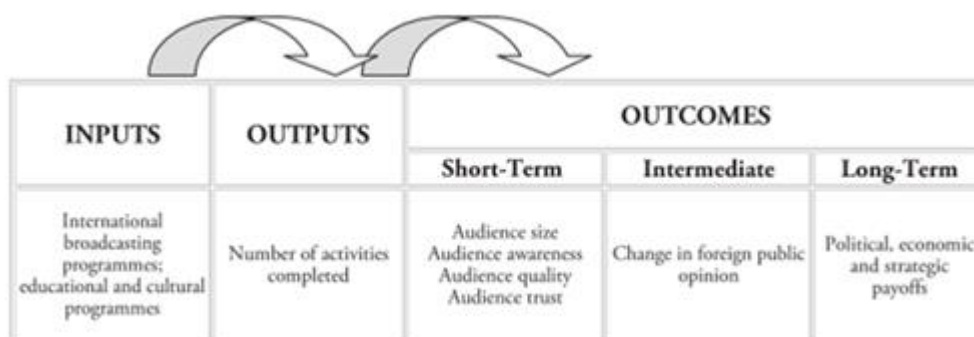
bertujuan untuk mengubah sifat hubungan antara negara praktisi dengan negara tujuan. Proses sosialisasi kemudian tidak hanya meningkatkan intensitas aktivitas kedua negara, tetapi juga proses ini—karena didasari oleh jejaring sosial—yang mana kuantitas dan kualitas interaksi diantara negara ini merupakan hal yang penting dan mampu mempengaruhi peningkatan volume dan memperluas interaksi. Interaksi yang terjadi ini tidak terbatas hanya pada aktor negara, tetapi juga dengan antar aktor non-negara semisal antar masyarakat dan interaksi yang dilakukan terjadi dalam berbagai macam topik.

Melalui interaksi yang terjadi dalam proses sosialisasi, proses ini memberikan pengaruh pada dinamika hubungan (*relationship dynamics*)²⁷ negara praktisi dan negara tujuan. Perubahan dinamika hubungan yang bersifat positif memberikan sejumlah dampak baik bagi kedua negara, terlebih lagi untuk negara praktisi. Dampak yang muncul dapat berupa terbentuknya kesepahaman antara dua pihak, terbentuknya hubungan relasi berkat keterlibatan hubungan *people-to-people*—khususnya dengan aktor non-negara, terbangunnya fondasi komunikasi yang kuat, begitu pula dengan meningkatkan kepentingan nasional dan mencapai atau memenuhi tujuan KLN negara praktisi. Namun walaupun demikian, dampak tersebut dapat muncul atau dirasakan oleh negara praktisi bergantung pada durasi

²⁷ Terdapat tiga sudut pandang untuk mengidentifikasi dampak dari diplomasi publik, yaitu *public opinion*, *relationship dynamics* dan *public debate*. Namun dalam konteks ini, *public opinion* merupakan dampak yang sulit untuk dicapai dan membutuhkan waktu dalam pelaksanaan praktik diplomasi publik.

program diplomasi publik tersebut dilaksanakan dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan program diplomasi publik.^{28 29}

Gambar 1.1 *Inputs, Outputs, Outcomes*



Source: Pierre C. Pahlavi, "Evaluating Public Diplomacy Programmes" *The Hague Journal of Diplomacy* 2 (2007): 255 – 281.

Sehingga berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam bagian ini, konsep-konsep tersebut sangat membantu penulis dalam melakukan analisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Dimana konsep KLN memberikan dukungan terhadap konsep diplomasi yang dilihat dan digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan yang dimiliki sebuah negara. Di sisi lain pun melalui konsep *small states* konsep tersebut membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana Selandia Baru bisa digolongkan sebagai negara kecil dan konsep ini pun mempermudah penulis untuk membahas konsep *hard power* serta *soft power* yang umumnya menjadi aspek yang identik yang dimiliki oleh negara kecil. Maka dari itu kemudian konsep diplomasi publik menjadi digunakan oleh penulis untuk

²⁸ Efe Sevin, "Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy" *Public Relation Review* (2015): 1-7.

²⁹ Pierre C. Pahlavi, "Evaluating Public Diplomacy Programmes" *The Hague Journal of Diplomacy* 2, (2007): 255-281.

menjelaskan bagaimana sebuah negara kecil memanfaatkan *soft power* yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan nasional melalui pendekatan penetrasi. Dari pemanfaatan kekuatan tersebut, aktivitas diplomasi publik tersebut kemudian memberikan dampak yang bagi negara praktisi yang membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam konteks ini konsep dampak membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana dampak dari aktivitas diplomasi publik dapat muncul dan keterkaitannya dengan jangka waktu dilakukannya aktivitas diplomasi publik tersebut.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang didasari oleh studi kasus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa Harrison dan Theresa Callan, metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilandasi oleh pendekatan interpretatif yang berusaha untuk memahami mengapa seseorang melihat tindakan, nilai-nilai, kepercayaan, dan keputusan dalam posisi tertentu. Selaras dengan pengertian yang telah disebutkan, metode penelitian kualitatif pun memiliki tujuan untuk memahami, menafsirkan, hingga menemukan makna dari suatu fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, jenis metode yang digunakan yaitu studi kasus, merupakan cara untuk mengembangkan analisis mendalam terkait satu atau

beberapa kasus.³⁰ Maka dari itu, metode penelitian kualitatif deskriptif yang didasari oleh studi kasus merupakan metode yang tepat bagi penulis untuk mencari tahu serta menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbasis studi kepustakaan yang akan diakses melalui internet. Melalui akses tersebut, penulis akan menggunakan sejumlah data serta informasi yang bersumber dari buku, artikel dalam jurnal, serta informasi pada media massa baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dimana informasi maupun data tersebut dilakukan dalam bentuk studi pustaka serta studi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, data yang terkumpul pun dapat berupa dokumen primer yang berbentuk *press release* dari pemerintah, dokumen laporan, dan lain-lain. Yang kemudian didukung oleh dokumen sekunder seperti berita, siaran hasil wawancara yang dipublikasikan di media massa, dan lain-lain.

³⁰ Umar Suryadi Bakry, "Metodologi Penelitian: Kualitatif Versus Metode Penelitian Hubungan Internasional" di *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2016. Hal. 16, 18, 63, 113.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul “Dampak Aktivitas Diplomasi Publik Selandia Baru terhadap Kanada melalui Pemanfaatan *Soft Power*” terbagi menjadi empat bab. Bab ke-I membahas penjelasan terkait latar belakang masalah dari topik yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan ketidaksesuaian yang muncul pada topik yang penulis angkat di bagian identifikasi masalah. Sebagai bab pendahuluan, penulis juga menjelaskan hal seperti tujuan atau hipotesa penulis, konsep yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini, metode-teknik penelitian, hingga penjabaran singkat sistematika pembahasan yang akan dilakukan penulis di bab selanjutnya.

Bab ke-II dalam penelitian ini membahas secara detail seperti bagaimana Selandia Baru dapat disebut sebagai negara kecil, kepentingan nasional serta KLN yang dimiliki, urgensi yang mendorong praktik diplomasi publik, begitu pula pembahasan terkait *soft power* yang digunakan. Lalu dalam bab ini pula penulis membahas hubungan yang dimiliki oleh Selandia Baru dengan negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan yang memiliki hubungan diplomatik maupun hubungan bilateral erat. Kemudian bahasan dalam bab ini dipersempit dengan pembahasan terkait hubungan diplomatik Selandia Baru dengan Kanada.

Lalu pada bab ke-III penulis menganalisis aktivitas diplomasi publik apa saja yang dilakukan oleh Selandia Baru terhadap Kanada dalam kurun waktu 2010 hingga 2016, begitu pula dengan proses yang terjadi di dalamnya dan dampak yang dihasilkan setelah tahun 2016 melalui konsep diplomasi publik, konsep penetrasi

dan konsep dampak. Bab ini juga menjelaskan bagaimana praktik diplomasi publik yang dilakukan ini berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara tersebut dan bagaimana praktik diplomasi publik ini membantu Selandia Baru dalam melindungi serta mencapai kepentingan nasional yang dimiliki.

Bab ke-IV merupakan bagian yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini membahas kembali pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini lalu menjawab pertanyaan tersebut dengan hasil analisis yang telah dilakukan.